|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian  | : | Metro Sulawesi | KasubaudSulteng II |
| Hari, tanggal | : | Kamis, 9 Juli 2015 |
| Keterangan | : | Fraksi Gerindra Kritisi LPj Pelaksanaan APBD Poso 2014 |
| Entitas | : | Poso |

**Poso, Metrosulawesi.com -** Sidang paripurna DPRD Poso yang digelar, kamis (9/7) merupakan sidang paripurna lanjutan, setelah sehari sebelumnya ditempat yang sama digelar sidang pengantar nota keuangan atas laporan pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kabupaten Poso pada tahun 2014. Dalam sidang paripurna tersebut, seluruh fraksi mempertanyakan status opini yang diraih Kabupaten Poso dari BPK RI.

Dalam sidang ini, 6 fraksi di DPRD Poso kembali diberikan kesempatan untuk memberikan penyampaian pandangan umumnya terhadap laporan keuangan tersebut.

Dari 6 fraksi yang ada di lembaga tersebut, semuannya menerima laporan untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Namun semuanya memberikan catatan dan pertanyaan. Tidak terlepas dari hal tersebut, 6 fraksi di DPRD Poso tersebut mempertanyakan terkait dengan berolehan status opini BPK RI wajar dengan pengecualian (WDP) yang diberikan  kepada Kabupaten Poso pada tahun anggran 2014.

Dalam kesempatan itu, fraksi Gerindra memberikan catatan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, diantaranya pandangan fraksi yang disampaikan oleh Ketut Suano. Ia menyebutkan, walaupun PAD daerah ini pada tahun anggaran 2014 melampaui target Rp 66,7 miliar, namun hal itu diharapkannya tidak membuat pemerintah daerah terlalu berbesar hati.

“Sebab bisa jadi jika pengelolaan dan penatausahaan sumber-sumber PAD di manajemen secara lebih profesional, bukan tidak mungkin besaran PAD akan lebih optimal lagi. Untuk itu fraksi Gerindra menekankan pentingnya penempatan aparatur yang memiliki kompetensi, kualitas dan berintegrasi pada satuan kerja Pemda,” tuturnya.

Menurut Ketua fraksi Partai Gerindra, Hidayat Bungasawa, fraksi  memberikan catatan pada aspek perencanaan, terutama berkaitan dengan perencanaan kegiatan anggaran pada sektor belanja modal. Sebab dalam catatan fraksi  tidak sedikit rencana kegiatan anggaran pada sektor belanja modal yang tidak bersinergi antara output, input serta outcome.

“Akibatnya banyak anggaran dan belanja modal yang tidak menyentuh pada kesejahteraan warga masyarakat itu sendiri. Salah satu solusinya fraksi Gerindra akan melakukan pengawalan terhadap distribusi pagu anggaran pada tahap pembahasan agar efeknya dirasakan oleh warga,” kata politisi dari dapil Poso bersaudara tersebut.

Hidayat menambahkan, Mengacu pada LHP BPK RI Sulteng, hampir semua pelaksanaan kegiatan anggaran satuan kerja Pemkab mendapatkan catatan temuan dalam kategori pelanggaran yang bervariasi. Tentu saja kendala inilah yang kemudian sangat mempengaruhi penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah ini menjadi WDP.

“Fraksi juga menambahkan catatan lainnya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat sebagai lembaga yang diberikan tugas dan fungsi melakukan pengawasan tehnis pengelolaan keuangan daerah sangat perlu dioptimalkan. Sebab, jika pengawasan ekstra ketat sejak awal mulainya kegiatan di satu SKPD dilakukan dengan baik oleh instansi pengawasan.”

“Maka kesalahan dalam tata kelola keuangan dapat dicegah. Olehnya inspektorat diharapkan  mampu mengambil peran penting dan aktif dalam mengawal pelaksanaan anggaran di masa mendatang,” tuturnya.